

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT
TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA DAN ANEKA**

NOTA DINAS

NOMOR: AK.03.01/181/D.V.M.EKON.3/10/2026

Yth : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan
Pariwisata
Dari : Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,
Elektronika, dan Aneka
Hal : Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulan III TA 2026
Tanggal : 15 Oktober 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Saudara pada tanggal 2 Oktober 2026 nomor AK.03.01/469/D.V.M.EKON.1/10/2026 perihal Permohonan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III TA 2026, bersama ini kami sampaikan laporan sebagaimana dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Pengembangan Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi,
Elektronika, dan Aneka



Dr. Atong Soekirman, SE., MM.
NIP 197003131989121003

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi s.d Triwulan I 2026	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas					
1.1	Indikator Kinerja 1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB	Persentase	1,49%	-*	N/A	N/A
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Jangka Menengah pada RPerpres Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru	Persentase	100%	-*	N/A	N/A
II	Sasaran kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka					
2.1	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	Persentase	80%	60%	60%	100%

	Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA					
2.2	Indikator Kinerja 2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	Persentase	80%	60%	60%	100%
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka					
3.1	Indikator Kinerja 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,85	128%
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola di Unit Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik					
4.1	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat	Presentase	92%	75%	80%	106,7%

	Transportasi, Elektronika, dan Aneka					
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

*target tahunan

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: “Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB”

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diurabajakan sebagai berikut:

1.1. Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB

Latar Belakang

Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 s.d. 2029. Perekonomian Indonesia pernah mencapai pertumbuhan 8% pada tahun 1995. Rata rata pertumbuhan 1989-1996 sebesar 7,3% didukung oleh key Driver yaitu Investasi/PMTB sebesar 4,9% s.d. 14,6% yoy, Konsumsi Rumah Tangga 2,9% s.d. 12,6% yoy, dan Ekspor (CPO, tekstil, migas) rata-rata 9,7% yoy per tahun. Adapun key sector yang menjadi penggerak pertumbuhan antara lain manufaktur (tekstil, otomotif) dan konstruksi, yang didukung dengan key policy yaitu deregulasi, perdagangan, dan investasi.

Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) merupakan salah satu sektor industri yang memiliki kontribusi signifikan terhadap industri pengolahan non migas. Pada Triwulan III-2024, share ILMATE tercatat sebesar 4,37% terhadap PDB Nasional. Laju pertumbuhan sektor industri ILMATE jauh di atas laju pertumbuhan PDB Nasional dan pertumbuhan industri pengolahan non migas. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan Industri ILMATE mencapai 10,13%, dimana laju pertumbuhan PDB Nasional hanya berkisar 5,31%, dan laju pertumbuhan industri pengolahan non migas sebesar 5,01%.

Kebijakan utama pada Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka difokuskan pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pada sektor industri pengolahan non migas khususnya logam, mesin, elektronika, dan aneka. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa tanggungjawab penuh terhadap naik atau turunnya industri pengolahan non migas berada di bawah wewenang Kementerian Perindustrian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

Sasaran ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri pengolahan khususnya ILMATEA yang berkualitas dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis komoditi, meningkatkan ekspor serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian IKU Asdep ILMATEA dihitung berdasarkan data Kontribusi PDB Lapangan Usaha yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian akan dibandingkan antara target dengan capaiannya, dengan rumus sebagai berikut:

Peningkatan Kontribusi ILMATEA terhadap PDB

$$= \frac{(\text{Kontribusi ILMATEA thd PDB}_t - \text{Kontribusi ILMATEA thd PDB}_{t-1})}{\text{Kontribusi ILMATEA thd PDB}_{t-1}}$$

ILMATEA mencakup 5 sektor dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Industri Pengolahan, yaitu:

1. Industri Logam Dasar
2. Industri Mesin dan Perlengkapan
3. Industri Alat Angkutan
4. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
5. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 1,49%. Adapun tidak ada target triwulan pada IKU ini.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, ringkasan capaian indikator kinerja 1.1 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB	Persentase	1,49%	-	N/A	N/A

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1, yaitu “*Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB*”. Target kinerja tahunan untuk indikator ini adalah sebesar **1,49%**.

Namun, karena IKU ini bersifat **tahunan**, maka pada periode Triwulan III belum terdapat target maupun realisasi capaian. Oleh sebab itu, Target Triwulan III, Realisasi, dan Capaian Kinerja ditandai sebagai **N/A (Not Available)**. Ini berarti pengukuran kinerja belum dapat dilakukan pada periode berjalan dan baru akan dievaluasi secara penuh di akhir tahun 2026 sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Finalisasi Penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan strategis produktivitas dan daya saing ILMATEA	Terlaksana	1. Kunjungan Kerja ke KEK Galang Batang dalam rangka monitoring permasalahan strategis produktivitas dan daya saing industri logam dasar, dimana KEK Galang Batang dan Pulau Bintan merupakan Kawasan Industri dengan komoditas Bauksit yang cukup besar di Indonesia. KEK Galang Batang memiliki tingkat utilisasi kawasan yang tinggi (sekitar 80 persen) dengan luas kawasan mencapai 2.333,6 hektare dan potensi perluasan hingga sekitar 1.400 hektare, sehingga memiliki peluang besar untuk pengembangan investasi dan industri hilir strategis. Diperlukan dukungan kebijakan berupa insentif hilirisasi yang lebih kompetitif bagi industri di KEK, termasuk kemungkinan pemberian perlakuan khusus, untuk meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing kawasan. 2. Berdasarkan koordinasi internal pemerintah dan asosiasi terkait kriteria dan skema insentif fiskal program Motor Listrik Nasional, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan akan menyamakan pemahaman terkait kriteria Motor Listrik Nasional dan skema insentif Molinas. Kementerian Perindustrian memerlukan surat atau hasil risalah rapat terbatas dipimpin Presiden dari Kemensetneg sebagai dasar menyelenggarakan program insentif Banpel. Kementerian Koordinator Perekonomian diharapkan mengoordinasikan tindak lanjut rapat termasuk terkait surat Kemensetneg atau notulen Rapat Terbatas sebagai dasar bagi penyelenggaraan Banpel oleh Kementerian Perindustrian. 3. Berpartisipasi aktif dalam Drone Summit Indonesia 2026 pada 8 September 2026 dengan hasil sebagai berikut: a. Pengembangan industri drone nasional perlu didukung oleh peta jalan yang terintegrasi dan konsisten, khususnya dalam

			harmonisasi regulasi dan sertifikasi, penguatan TKDN dan rantai pasok, peningkatan penguasaan teknologi dan R&D, serta perluasan pemanfaatan produk dalam negeri dan akses pasar ekspor. Hal tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, lembaga riset, akademisi, dan mitra internasional. b. Secara keseluruhan, Indonesia telah memiliki modal awal untuk membangun industri drone yang mandiri dan berdaya saing, didukung oleh keberadaan pelaku industri, kapasitas riset dan teknologi, SDM, serta potensi pasar domestik dan ekspor. Hasil Indonesia Drone Summit 2026 diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan rekomendasi dan kerangka Roadmap Industri Drone Indonesia 2045 sebagai arah pengembangan ekosistem industri drone nasional ke depan.
--	--	--	--

2.	Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ILMATEA	Terlaksana	1. Berdasarkan hasil kegiatan diskusi dalam Sharing Session Penguatan Industri Besi dan Baja nasional: Tantangan, Peluang, dan Arah Kebijakan dalam Menghadapi Lonjakan Impor Baja serta Penguatan Industri Dalam Negeri, dibahas juga kondisi industri baja secara umum, disusun 2 telaah staf dalam rangka mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan dengan judul: (i) Telaah Staf Strategi Perlindungan dan Penguatan Industri Baja Nasional terhadap Penyalahgunaan Masterlist (Fasilitas Pembebasan Bea Masuk); (ii) Telaah Staf Analisis Impor Besi dan Baja untuk Bangunan Prefabrikasi serta Strategi Penguatan Nilai Tambah Domestik
----	---	------------	--

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Sektor industri logam dasar, khususnya industri baja menghadapi permasalahan seperti celah regulasi pada mekanisme penerbitan otomatis (fiktif positif), kelonggaran syarat pembelian mesin impor lokal, serta asimetri verifikasi spesifikasi barang. Selain itu, pengendalian impor masih berorientasi pada pendekatan administratif berbasis HS Code dan belum sepenuhnya mempertimbangkan ketersediaan produk dalam negeri, kapasitas industri nasional, maupun pengembangan rantai nilai industri baja.
2. Sektor alat transportasi menghadapi permasalahan perbedaan pemahaman terkait kriteria Motor Listrik Nasional dan skema insentif Molinas. Kementerian Perindustrian memerlukan surat atau hasil risalah rapat terbatas dipimpin Presiden dari Kemensetneg sebagai dasar menyelenggarakan program insentif Banpel.
3. Belum tersedia kajian *cost-benefit analysis* serta pemetaan dampak ekonomi industri drone nasional yang komprehensif sebagai dasar dalam menentukan prioritas kebijakan, termasuk identifikasi sektor dengan potensi manfaat ekonomi terbesar dan kebutuhan intervensi pemerintah.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Diperlukan penataan ulang dan penguatan tata kelola Masterlist secara menyeluruh, proporsional, dan terintegrasi tanpa mengorbankan iklim kemudahan berinvestasi.
2. Diperlukan koordinasi tindak lanjut rapat termasuk terkait surat Kemensetneg atau notulen Rapat Terbatas sebagai dasar bagi penyelenggaraan Banpel oleh Kementerian Perindustrian.

3. Frogs Indonesia bersama Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak akan menyusun kajian *cost-benefit analysis* mengenai potensi pengembangan industri drone sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

**1.2. Persentase
Penyelesaian
Penyusunan
Rencana Aksi
(Renaksi)
Jangka
Menengah pada
RPerpres Peta
Jalan
Pengembangan
Ekosistem
Semikonduktor
dan Teknologi
Baru**

Latar Belakang

Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 s.d. 2029. Perekonomian Indonesia pernah mencapai pertumbuhan 8% pada tahun 1995. Rata rata pertumbuhan 1989-1996 sebesar 7,3% didukung oleh key Driver yaitu Investasi/PMTB sebesar 4,9% s.d. 14,6% yoy, Konsumsi Rumah Tangga 2,9% s.d. 12,6% yoy, dan Ekspor (CPO, tekstil, migas) rata-rata 9,7% yoy per tahun. Adapun key sector yang menjadi penggerak pertumbuhan antara lain manufaktur (tekstil, otomotif) dan konstruksi, yang didukung dengan key policy yaitu deregulasi, perdagangan, dan investasi.

Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) merupakan salah satu sektor industri yang memiliki kontribusi signifikan terhadap industri pengolahan non migas. Pada Triwulan III-2025, share ILMATE tercatat sebesar 4,51% terhadap PDB Nasional. Laju pertumbuhan sektor industri ILMATE jauh di atas laju pertumbuhan PDB Nasional dan pertumbuhan industri pengolahan non migas. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan Industri ILMATE rata-rata sebesar 4,10%, dimana laju pertumbuhan PDB Nasional hanya berkisar 5,03%, dan laju pertumbuhan industri pengolahan non migas sebesar 4,75%.

Kebijakan utama pada Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka difokuskan pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pada sektor industri pengolahan non migas khususnya logam, mesin, elektronika, dan aneka. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa tanggungjawab penuh terhadap naik atau turunnya industri pengolahan non migas berada di bawah wewenang Kementerian Perindustrian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

Dalam rangka memperkuat daya saing industri nasional dan menjawab tantangan global pada era transformasi digital, diperlukan upaya untuk mendorong terbentuknya sumber pertumbuhan ekonomi baru guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Dalam konteks tersebut, industri semikonduktor merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Industri semikonduktor tercatat memberikan kontribusi sekitar 19% terhadap total perdagangan barang elektronik global. Pemerintah mendorong pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru sebagai bagian integral dari penguatan sektor industri ILMATEA.

Semikonduktor merupakan teknologi kunci (enabling technology) yang menopang berbagai industri strategis, seperti elektronika, otomotif, alat kesehatan, pertahanan, energi terbarukan, serta teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem semikonduktor tidak hanya berorientasi pada aspek industri hulu–hilir, tetapi juga mencakup penguatan riset dan inovasi, pengembangan SDM, pembiayaan, regulasi, serta kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

Sasaran ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri pengolahan khususnya ILMATEA yang berkualitas dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis komoditi, meningkatkan ekspor serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase penyelesaian penyusunan renaksi jangka menengah sebagai lampiran pada RPerpres Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru dihitung berdasarkan seberapa banyak jumlah program dan kegiatan yang telah didetailkan dan dikonfirmasi oleh K/L pengampu yang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan program dan kegiatan pada rencana aksi yang telah disusun.

Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase penyelesaian penyusunan rencana aksi Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka:

$$\begin{aligned} & \% \text{ Penyelesaian Penyusunan Renaksi} \\ &= \frac{\text{Total renaksi yang didetailkan dan dikonfirmasi K/L}}{\text{Total renaksi yang dirumuskan}} \times 100\% \end{aligned}$$

Pengukuran ini mencerminkan tingkat kesiapan kebijakan operasional Pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru sesuai dengan arah pembangunan industri nasional dan transformasi ekonomi.

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Adapun tidak ada target triwulan pada IKU ini.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, ringkasan capaian indikator kinerja 1.1 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
Persentase Penyelesaian Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Jangka Menengah pada RPerpres Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru	Persentase	100%	-	N/A	N/A

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Finalisasi penyusunan Renaksi sebagai lampiran RPerpres Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru	Terlaksana	- Berpartisipasi aktif dalam Rapat Monev Pengendalian Terpadu Triwulan II pada 13 Agustus 2026 dengan Topik Pengembangan Industri Semikonduktor dengan hasil: Pengembangan industri semikonduktor nasional masih menghadapi tantangan berupa belum terintegrasinya rantai industri dari hulu hingga hilir, keterbatasan SDM berpengalaman, belum tersedianya pasar yang menjamin penyerapan produk, serta kebutuhan investasi dan infrastruktur yang besar. - Berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Terpadu Diplomasi Teknologi pada 16 September 2026 untuk membahas posisi semikonduktor dalam rantai pasok global dengan hasil: Kerja sama internasional perlu diperkuat melalui kerangka kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan. Cakupannya meliputi penelitian dan pengembangan bersama (joint R&D), kemitraan bisnis antar-startup, serta kerja sama dengan lembaga riset dan perusahaan teknologi seperti imec, CNRS, Arm, dan ASML, serta jaringan perguruan tinggi global. - Rapat Diskusi Regulasi dan Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor pd tgl 8 september 2026, dengan hasil: a. Roadmap industri semikonduktor: saat ini sedang disusun oleh Kementerian Perindustrian sebagai turunan dari Inpres 1/2026. b. Pengembangan semikonduktor tidak tepat hanya ditagging pada Rencana Output (RO) pasir silika karena ekosistem semikonduktor bersifat multi-komoditas. Selain itu, sebagian besar investasi pasir

			silika yang masuk sebagian besar untuk industri kaca sehingga belum dapat menjamin terbentuknya investasi semikonduktor. • Berpartisipasi aktif pada FGD Future Technology Forum 2026 pada tanggal 21 Agustus 2026 dengan hasil: Bergabungnya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ke dalam konsorsium ICDEC diresmikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Langkah ini membuka ruang kolaborasi bagi UIN Malang untuk memperkuat ekosistem ICDEC sebagai salah satu pusat utama pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang semikonduktor. • Telah dilaksanakan pelatihan oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kegiatan Semiconductor Security Academy (SSA) tahun 2026, yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juli s.d. 17 Juli 2026 di Albuquerque New Mexico Amerika Serikat dengan hasil: a. Industri semikonduktor merupakan ekosistem global berteknologi tinggi yang sangat bergantung pada efisiensi manufaktur, perlindungan fisik dan siber, serta regulasi Strategic Trade Management (STM) guna mencegah penyelundupan dan penyalahgunaan teknologi kegunaan ganda (dual-use). b. Dalam ekosistem ini, Indonesia berpeluang besar untuk mengisi segmen Back-End (Assembly, Testing, & Packaging/ATP) sekaligus menjadi penyedia bahan baku terproses, seperti silika, tembaga, dan timah. Namun, peluang ini harus diimbangi dengan penguatan pengawasan jalur perdagangan transshipment di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berstandar internasional.
--	--	--	---

--	--	--	--

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga masih belum berjalan dengan baik dimana setelah terbit Inpres 1 Nomor 2026 tentang Pengembangan Industri Semikonduktor, Kemenperin ditugaskan untuk menyusun roadmap. Sedangkan di tahun 2025, Kemenko Perekonomian sudah menyusun roadmap terlebih dahulu. Masih diperlukan koordinasi terkait penyamaan persepsi antara roadmap yang sedang disusun oleh Kemenperin dengan roadmap yang pernah disusun oleh Kemenko Perekonomian.
2. Pelaku industri menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dan hubungan bisnis dalam mengakses pasar antar pelaku usaha (business-to-business/B2B), serta tantangan pendanaan pada masa tech winter yang dihadapi oleh para pelaku usaha high technology.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diharapkan dapat melakukan koordinasi lebih lanjut guna menyelaraskan grand design, peta jalan pengembangan industri semikonduktor, dan peta jalan hilirisasi investasi strategis, termasuk substansi, tahapan, target, pembagian peran, dan bentuk regulasinya.
2. Diperlukan penyediaan insentif yang kompetitif, pengembangan skema startup visa, serta pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) digital untuk menarik talenta dan pendanaan internasional.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas di Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Presentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan terkait Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA;
2. Presentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Presentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan terkait Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan aneka.

Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka merupakan sasaran kegiatan perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran kegiatan perspektif stakeholder. Dengan kata lain, kebijakan di bidang ILMATEA dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.

Hasil Pengukuran Kinerja

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian terkait Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA

% efektivitas SKP = Nilai Tahapan Pertama + Nilai Tahapan Kedua

+Nilai Tahapan Ketiga + Nilai Tahapan Keempat

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Adapun target triwulan pada IKU ini sebesar 60%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator kinerja 2.1 yaitu sebesar 60% mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
Presentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan terkait Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA	Persentase	80%	60%	60%	100%

Pada Triwulan III tahun 2026, Asisten Deputi ILMATEA telah menyelesaikan serangkaian tahapan dalam proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka (ILMATEA), serta upaya Peningkatan Utilitas sektor tersebut. Nilai efektivitas kinerja diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan empat tahapan siklus kebijakan sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Asisten Deputi ILMATEA telah mengidentifikasi isu strategis dan merumuskan fokus koordinasi untuk satu tahun ke depan. Keluaran yang telah diselesaikan pada tahap ini meliputi: (i) Undangan rapat dan daftar hadir; (ii) Notula/Risalah; (iii) Dokumen terkait hasil Rakor/FGD mengenai Pengembangan Industri Logam, Ekosistem Semikonduktor, dan KBLBB.

2. Tahap Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Pada tahapan ini, telah disusun alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program untuk menjawab isu-isu yang telah diidentifikasi. Keluaran yang telah dihasilkan meliputi: (i) Konsep berupa bahan kebijakan/program; (ii) Undangan,

notula, dan daftar hadir rapat pembahasan alternatif kebijakan; (ii) Hasil rapat pembahasan kebijakan terkait sektor logam, semikonduktor, dan KBLBB

3. Tahap Koordinasi Formulasi Kebijakan

Unit kerja telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk merumuskan kebijakan bersama.

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Unit kerja juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah diformulasikan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Melakukan penyelesaian atas permasalahan dalam pemenuhan bahan baku serta peningkatan utilitas Industri Logam, Mesin	Terlaksana	Menindaklanjuti kegiatan Sharing Session Penguatan Industri Besi dan Baja nasional: Tantangan, Peluang, dan Arah Kebijakan dalam Menghadapi Lonjakan Impor Baja serta Penguatan Industri Dalam Negeri, yang dilaksanakan bulan Juni 2026, telah disusun telaah staf sebagai berikut: 1. Telaah Staf Strategi Perlindungan dan Penguatan Industri Baja Nasional terhadap Penyalahgunaan Masterlist (Fasilitas Pembebasan Bea Masuk): Terdapat celah regulasi pada mekanisme penerbitan otomatis (fiktif positif), kelonggaran syarat pembelian mesin impor lokal, serta asimetri verifikasi spesifikasi barang. Penyalahgunaan Masterlist menimbulkan distorsi pasar, lonjakan impor (khususnya produk hilir HS 73 dan BJLAS Boron), penurunan utilisasi

			industri baja nasional hingga 52,7%, serta mengancam keberlanjutan investasi hulu-hilir. Diperlukan penataan ulang dan penguatan tata kelola Masterlist secara menyeluruh, proporsional, dan terintegrasi tanpa mengorbankan iklim kemudahan berinvestasi. 2. Telaah Staf Telaah Staf Analisis Impor Besi dan Baja untuk Bangunan Prefabrikasi serta Strategi Penguatan Nilai Tambah Domestik. Berdasarkan hasil telaahan, permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi impor, melainkan pada belum optimalnya implementasi dan integrasi kebijakan perdagangan dengan kebijakan pengembangan industri. Pengendalian impor masih berorientasi pada pendekatan administratif berbasis HS Code dan belum sepenuhnya mempertimbangkan ketersediaan produk dalam negeri, kapasitas industri nasional, maupun pengembangan rantai nilai industri baja.
2.	Melakukan penyelesaian atas permasalahan dalam pemenuhan bahan baku serta peningkatan utilitas Industri Kendaraan Bermotor, Perkapalan, Kereta Api, Dirgantara, dan Alat Berat	Terlaksana	- Untuk meningkatkan utilisasi industri kendaraan bermotor listrik dan mendukung program konversi motor BBM ke motor listrik, telah mengikuti FGD konversi motor BBM ke motor listrik dengan hasil perlunya kajian dan kebijakan ekonomi sirkular untuk penanganan mesin dan komponen bekas hasil konversi, pelibatan perguruan tinggi secara lebih terstruktur, serta penyelarasan target konversi dengan kapasitas pembangkit PLTS di tingkat kawasan dan penetapan target yang realistis agar dapat dilaksanakan secara

			optimal. yang berisiko tidak tercapai - Untuk meningkatkan utilisasi industri perkapalan, telah mengikuti Rapat Pembahasan Peta Jalan (Roadmap) Industri Perkapalan Nasional, dengan hasil bahwa Kementerian Perindustrian akan menyampaikan kuesioner dan permintaan data/proyeksi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, BUMN, dan asosiasi industri, sebagai bahan penyusunan draf awal roadmap, serta menjadwalkan rapat lanjutan secara lebih spesifik untuk membahas aspek kepastian permintaan, kapabilitas galangan, komponen dan rantai pasok, pembiayaan dan investasi, teknologi dan greening, SDM dan R&D, tata kelola data, serta harmonisasi kebijakan sesuai timeline yang akan disusun.
3.	Melakukan penyelesaian atas permasalahan dalam pengoptimalan kapasitas industri untuk peningkatan utilisasi Industri Handphone, komputer, Tablet (HKT) dan Alkes	Terlaksana	Berpartisipasi aktif dalam Rapat Penyusunan Roadmap Percepatan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dengan hasil rapat: Kemenko Perekonomian akan menyusun roadmap nasional sebagai payung koordinasi seluruh program lintas K/L. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan sektoral sekaligus memastikan sinkronisasi program guna mencapai target RPJMN 2025-2029.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Ikut serta hadir dalam Rapat Pembahasan Konsep Peta Jalan (Roadmap) Industri Perkapalan Nasional pada 15 September 2026
2. Ikut serta hadir dalam FGD Harmonisasi Skema Insentif Fiskal Sepeda Motor Listrik: Sinkronisasi Konversi, Trade-In, dan Bantuan Pembelian Motor Baru pada 22 Juli 2026;

3. Ikut serta hadir dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Mobil Nasional dan Motor Listrik Nasional pada 4 Agustus 2026;
4. Ikut serta hadir dalam Rapat Koordinasi Internal Pemerintah dan Asosiasi terkait Kriteria dan Skema Insentif Fiskal Program Motor Listrik Nasional (Molinas) pada 1 September 2026;
5. Ikut serta hadir dalam FGD Program Konversi Motor BBM ke Motor Listrik pada 15 September 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat celah regulasi pada mekanisme penerbitan otomatis (fiktif positif), kelonggaran syarat pembelian mesin impor lokal, serta asimetri verifikasi spesifikasi barang. Selain itu, pengendalian impor masih berorientasi pada pendekatan administratif berbasis HS Code dan belum sepenuhnya mempertimbangkan ketersediaan produk dalam negeri, kapasitas industri nasional, maupun pengembangan rantai nilai industri baja.
2. Data dan informasi terkait farmasi dan alat kesehatan mencakup roadmap hingga rencana aksi teknis masih tersebar di masing-masing K/L sehingga belum terintegrasi satu sama lain.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Diperlukan penataan ulang dan penguatan tata kelola Masterlist secara menyeluruh, proporsional, dan terintegrasi tanpa mengorbankan iklim kemudahan berinvestasi.
2. Dokumen perencanaan sektoral seperti roadmap, rencana aksi teknis (termasuk draft RIPIN dan KIN) serta data dukung K/L akan diserahkan ke Kemenko Perekonomian sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Pleno bersama Kemenkes.

2.2. Presentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan aneka.

Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka merupakan sasaran kegiatan perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran kegiatan perspektif stakeholder. Dengan kata lain, kebijakan di bidang ILMATEA

dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.

Hasil Pengukuran Kinerja

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

$$\begin{aligned} \% \text{ efektivitas SKP} &= \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} \\ &+ \text{Nilai Tahapan Ketiga} + \text{Nilai Tahapan Keempat} \end{aligned}$$

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Adapun target triwulan pada IKU ini sebesar 60%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator kinerja 2.2 yaitu sebesar 60% mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
Presentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	Persentase	80%	60%	60%	100%

Dalam rangka mendukung pengembangan sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka (ILMATEA), unit kerja telah melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif melalui empat tahapan siklus kebijakan. Pelaksanaan tersebut menjadi

dasar penilaian **Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi** terhadap regulasi-regulasi pendukung sektor ILMATEA.

Tahap 1: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Unit kerja telah mengidentifikasi isu strategis dan merumuskan agenda koordinasi yang menjadi prioritas tahunan, seperti isu pengembangan industri logam dasar, ekosistem semikonduktor nasional, serta kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB).

Tahap 2: Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan

Alternatif kebijakan dan/atau program disusun untuk menyelesaikan isu yang telah diidentifikasi, dengan mengedepankan pendekatan berbasis bukti dan hasil pemetaan stakeholder.

Tahap 3: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Asisten Deputi ILMATEA telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk menyusun regulasi strategis.

Tahap 4: Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak implementasi kebijakan yang telah diformulasikan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi perbaikan ke depan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Melakukan penyelesaian kendala/permasalahan hambatan implementasi TKDN dan P3DN untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,	Terlaksana	• Telah dilaksanakan rangkaian rapat pembahasan draft Kepmenko P3DN dengan hasil: - Pokja Pemantauan Pemerintah dan BUMN memiliki peran krusial dalam keberhasilan pelaksanaan P3DN, khususnya dalam mengawasi, mengevaluasi, dan mengakselerasi komitmen yang telah diberikan hingga

	Elektronika, dan Aneka		implementasi program TKDN pada masing-masing instansi. Berdasarkan temuan Kementerian Perindustrian, nilai komitmen yang berasal dari kementerian/lembaga hanya sekitar Rp20 triliun, sedangkan mayoritas, yaitu sekitar Rp700–800 triliun, berasal dari BUMN. Oleh karena itu, Pokja Pemantauan Pemerintah dan BUMN diharapkan dapat mengawal realisasi komitmen tersebut. - Program kerja Pokja Sosialisasi perlu dimitigasi dan direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran pemerintah yang saat ini lebih terbatas dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam jangka pendek, program dapat dimulai melalui kampanye pencantuman logo TKDN yang disertai dengan informasi nilai TKDN. Adapun pelaksanaan Business Matching 2026 akan dilaporkan pada akhir Triwulan III.
--	------------------------	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Ikut serta hadir dalam Rapat Tim Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pembahasan mengenai Sanksi terhadap pemilik barang Over Dimension and Over Load (ODOL), DPR mengusulkan perluasan pengaturan subjek hukum penerima sanksi administratif ODOL yang semula hanya menysasar pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang, menjadi mencakup pemilik, pengemudi, penyewa dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang, serta sanksi bagi perusahaan yang melakukan ODOL berupa pencabutan perizinan berusaha dan/atau denda administratif (Pasal 169 ayat 1 dan Pasal 169A). Hal ini berpotensi berdampak pada sektor industri khususnya terkait peningkatan harga logistik barang

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Berdasarkan praktik di lapangan, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam realisasi dan implementasi TKDN, antara lain adanya perbedaan antara realisasi dengan komitmen atau rencana pengadaan yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu diperhatikan ketersediaan produk dalam negeri untuk mendukung berbagai program prioritas Presiden.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Kendati masih terdapat permasalahan pada praktik di lapangan, beberapa kementerian/lembaga telah memiliki praktik baik dalam pelaksanaan P3DN dan pengendalian impor, salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum. Praktik baik tersebut diharapkan dapat menjadi referensi untuk diadopsi oleh Pokja Timnas P3DN.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas di Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka ditunjukkan oleh pencapaian xx indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan aneka.

Hasil Pengukuran Kinerja

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \sigma_{ij}}{\sum \sigma_{ij}}$$

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Adapun target triwulan pada IKU ini sebesar 3 dari 4.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator kinerja 3.1 yaitu sebesar 128% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,85	128%

Dalam mengukur Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka belum dapat dilakukan karena rencana aksi pada triwulan III adalah Persiapan Pelaksanaan Survei. Adapun realisasi dari target tercapai 128% diukur dari telah dilaksanakannya Persiapan Pelaksanaan Survei dengan menyiapkan *google form* survei yang nantinya akan disebar.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Semester II	Terlaksana	Telah dilakukan persiapan survei layanan kepuasan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka dengan menyiapkan google form dan list <i>stakeholders</i> yang akan mengisi survei.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, diantaranya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada survei dilakukan dengan memanfaatkan *google form* dalam penyebaran survei sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan III 2026, tidak ada kendala dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, telah dilakukan beberapa upaya untuk pencapaian target, yakni memastikan pelaksanaan survei tepat waktu dan tepat sasaran.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas di Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka ditunjukkan oleh pencapaian 1 indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi

Latar Belakang

Terwujudnya Tata Kelola di Unit Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Kementerian Koordinator Bidang

**Reformasi Birokrasi
Asisten Deputi
Pengembangan
Industri Logam,
Mesin, Alat
Transportasi,
Elektronika, dan
Aneka**

Perekonomian yang Baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth dan merupakan turunan dari sasaran strategis Perspektif Learning and Growth level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Baik.

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Adapun target triwulan pada IKU ini sebesar 75%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator kinerja 4.1 yaitu sebesar 80% mencapai 106,7% dari target Triwulan III Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat	Persentase	92%	75%	80%	106,7%

Transportasi, Elektronika, dan Aneka					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Pada Triwulan III Tahun 2026, telah dilaksanakan 12 dari 15 renaksi tahunan terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka. Adapun renaksi yang telah dicapai, antara lain: (i) Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja; (ii) Penyusunan Matriks Manajemen Risiko; (iii) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan; (iv) Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026; (v) Optimalisasi pemanfaatan Srikandi.

Atas terpenuhinya 12 dari 15 renaksi tahunan tersebut, maka diperoleh angka persentase renaksi terlaksana pada Triwulan III sebesar 80% dari target tahunan sebesar 92%. Angka ketercapaian kinerja Triwulan III adalah sebesar 80% (memuaskan) dari target Triwulan III yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	Terlaksana	Telah dilakukan penetapan SK Tim Koordinasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
2.	Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan matriks manajemen risiko
3.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah disusun penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I dan II
4.	Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan TOR dan RAB
5.	Optimalisasi pemanfaatan Srikandi	Terlaksana	Telah memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam persuratan

Pada Triwulan III Tahun 2026, seluruh rencana aksi pendukung IKU 4.1 telah dilaksanakan sesuai target dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Penyusunan berbagai dokumen, seperti SK Tim, matriks

manajemen risiko, laporan kinerja triwulanan, serta TOR dan RAB, dilakukan secara internal sehingga tidak memerlukan penyelenggaraan kegiatan yang menimbulkan biaya tambahan. Di sisi lain, optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam proses persuratan dan pengarsipan mendukung digitalisasi administrasi, mengurangi penggunaan kertas, serta meningkatkan efisiensi tata kelola dokumen. Pelaksanaan rencana aksi tersebut juga sejalan dengan kebijakan penghematan anggaran Tahun 2026, sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana aksi pada Triwulan III Tahun 2026 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung. Kondisi tersebut mengharuskan unit kerja untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, membatasi pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran, serta menyesuaikan metode pelaksanaan agar tetap mendukung pencapaian target kinerja tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

**Asisten Deputi Pengembangan Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi,
Elektronika, dan Aneka**



Dr. Atona Soekirman. SE., MM.
NIP 197003131989121003